

## Perkembangan Gemeente Banjarmasin di Koran Bintang Borneo Tahun 1928

Berliani Sofyana<sup>1</sup>, Siti Marfuah<sup>2</sup>, Jamil Jamil<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Mulawarman

<sup>1</sup>berlianisofyana08@mail.com, <sup>2</sup>siti.marfuah@fkip.unmul.ac.id, <sup>3</sup>jamil@fkip.unmul.ac.id

Received	Accepted	Published
07/04/2023	19/05/2023	30/06/2023

**Abstract** *In the context of implementing Decentralisatie Wet 1903, the Dutch government issued Decentralisatie Besluit 1905 and Local Raden Ordonnantie. In Decentralisatie Besluit, the main points of formation, composition, position and authority of the council (Raad) in matters of financial management are separated from the central government. Meanwhile, the Local Raden Ordonnantie is an implementing regulation that regulates the structure, status and authority of the council (Raad), especially Gewestelijke Raad, Plaatselijk Raad, and Gemeenteraad. Gemeente Banjarmasin is a term in Dutch which means "municipality" or "regional government of Banjarmasin, Indonesia". Gemeente Banjarmasin is an administrative entity that regulates the territory and various aspects of Banjarmasin city government.*

**Keywords:** *Decentralization Besluit, Gemeente Banjarmasin, Banjarmasin.*

**Abstrak** *Dalam rangka pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903, pemerintah Belanda mengeluarkan Decentralisatie Besluit 1905 dan Local Raden Ordonnantie. Dalam Decentralisatie Besluit mengemukakan pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang dewan (Raad) dalam urusan pengelolaan keuangan dipisahkan dari pemerintah pusat. Sedangkan Local Raden Ordonnantie merupakan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang struktur, status dan wewenang dewan (Raad), khususnya Gewestelijke Raad, Plaatselijk Raad, dan Gemeenteraad. Gemeente Banjarmasin adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti "kotapraja" atau "pemerintahan daerah Banjarmasin, Indonesia". Gemeente Banjarmasin merupakan suatu entitas administrasi yang mengatur wilayah dan berbagai aspek pemerintahan kota Banjarmasin.*

**Kata kunci :** *Decentralisatie Besluit, Gemeente Banjarmasin, Banjarmasin.*



## PENDAHULUAN

Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang banyak wilayah perkotaannya terletak di sepanjang sungai. Sungai Barito merupakan sungai utama di Kalimantan Selatan dan mempunyai anak sungai antara lain Sungai Martapura dan Sungai Kween. Sungai-sungai yang terdapat di Kalimantan Selatan bagian barat bermuara ke Laut Jawa, sedangkan di bagian timur mengalir ke Selat Makassar sehingga membentuk jaringan transportasi dan perdagangan antar wilayah yang terhubung dengan wilayah lain. Banjarmasin merupakan salah satu kota tempat berlabuhnya kapal-kapal tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, Kalimantan Selatan dikenal dengan nama Zuid Oost Borneo.

Sejarah kota Banjarmasin mencerminkan berbagai interaksi budaya, khususnya antara budaya Banjar yang menjadi etnis utama daerah ini dengan pengaruh budaya asing yang datang melalui perdagangan maritim. Kebudayaan kota Banjarmasin berkembang sebagai hasil proses akulturasi budaya yang dipengaruhi oleh unsur budaya Melayu, Jawa, dan Bugis yang bercampur dengan unsur budaya etnis tingkat bawah, yaitu Dayak dan Bukit. Pada masa pemerintahan Sultan Adam (1825-1857), ketika sistem pemerintahan mengalami kemajuan dan mulai berkembang tata ruang kota di dataran Tatas, serta terbentuk arsitektur lingkungan alur Sungai Martapura. Di bawah pemerintahan Belanda, arsitektur pusat kota berubah dari arsitektur organik berbasis air menjadi arsitektur terencana berbasis air dan darat. Belanda memperkuat kedudukannya di Banjarmasin dan membangun kembali pelabuhan di Sungai Martapura pada tahun 1900. Banjarmasin kemudian menjadi kota yang padat dan ramai dengan pusat-pusat kegiatan perekonomian, khususnya di sungai Barito dan Martapura. Di antara dua sungai besar tersebut, Pelabuhan Martapura telah berkembang menjadi pelabuhan transit dan ekspor-impor.

Setelah menjadi daerah jajahan Belanda dari perjanjian pengembalian dengan Kerajaan Banjar pada tanggal 4 Mei 1826. Perjanjian ini membagi wilayah kota Banjar menjadi dua yaitu daerah Tatas menjadi pusat kekuasaan dan kegiatan administrasi di Hindia Belanda, baik sipil maupun militer, dan juga mendirikan benteng Schans van Tuyil. Pada alur Sungai Martapura di pusat kota terdapat Pelabuhan Banjarmasin, Kantor Syahbandar, Kantor VOC, Pasar Baru, Residen Belanda, Benteng Tatas, dan Pasar Lama (Setiadi, 2018). Gemeente mempunyai lembaga bernama Gementeerad yang merupakan badan legislatif dan terkadang juga mempunyai fungsi eksekutif karena dipimpin oleh seorang walikota. Anggota Gemeenteraad mewakili kelompok etnis yang tinggal di kota, khususnya golongan bangsa Eropa, Tionghoa, Timur Asing, dan bumiputra.

Dalam surat kabar Bintang Borneo tahun 1928, pada bagian ini, Vergadering akan membahas permasalahan lain mengenai permasalahan sosial, seperti yang baru kami tulis diatas, kalimat ini diambil dari surat Gemeenteraadlid, M. F. Runtewene. Tulisan ini mencakup banyak aspek sosial. Memang benar bahwa hal ini bisa diubah dengan mengambil arah yang berbeda, namun menurut data yang ada selama ini, angka-angka tersebut jarang dituliskan di atas kertas oleh Gementeraad hanya dalam teori dan tidak bisa dipraktikkan. Oleh karena itu, artikel ini juga membahas rumusan masalah berikut : 1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Gemeente Banjarmasin ? 2. Bagaimana Gemeente Banjarmasin mengelola air untuk menjaga kebersihan atau kesehatan masyarakat ?.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan beberapa arsip surat kabar dan buku sebagai sumber primer, serta berbagai referensi lain sebagai sumber sekunder. Sumber-sumber yang digunakan relevan dan sesuai dengan fakta sejarah. Adapun yang merupakan sumber primer antara lain : Koran Bintang Borneo Tahun 1928 Gemeente Banjarmasin dan terdapat referensi buku berjudul Sejarah Kota Banjarmasin. Sumber-sumber yang digunakan ini diperoleh dari beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (khastara perpunas) dan Repositori Institusi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian sumber sekunder diantaranya jurnal-jurnal yang relevan sesuai pembahasan materi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui Metode Sejarah sampai tahap metode terakhir, Historiografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Tanggung Jawab Gemeente Banjarmasin**

Pemerintah kolonial Belanda menguasai Kalimantan secara penuh pada tahun 1860 dan kemudian dimulailah pembagian administratif wilayah tersebut di bawah arahan Kolonel ECP Happel sebagai residen (Bondan, 1953; Saleh : 1977:65). Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sisa Kesultanan Banjar dengan nama "Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" (Koloniaal Verslag over het jaar 1858., p. 13). Sistem pembagian pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda sampai tahun 1877 mengakibatkan perubahan penafsiran. Penduduk Boer di Banjarmasin berpendapat bahwa sistem distribusi lama mereka sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur keselamatan (Staatsblad van Nederlandsch Indie 1877, no. 327). Dalam menjalankan pemerintahan di Banjarmasin, pemerintah Belanda membagi wilayahnya menjadi beberapa distrik atau onderafdeling. Setiap onderafdeling dipimpin oleh seorang pengontrol, sedangkan onderafdeling di perkotaan dipimpin oleh penduduk setempat yang bergelar kiai. Kepala desa dipimpin oleh seorang pem-bakal dan kepala desa terpencil disebut pambakal. Mereka masih diperbolehkan menggunakan gelar ksatria seperti

“Tumenggung”. Status mereka adalah sebagai bagian dari birokrasi pemerintah Belanda dan mereka juga mendapat gaji bulanan.

Di karesidenan Kalimantan Selatan, untuk pertama kalinya pada tahun 1919 didirikan Gemeenteraad Banjarmasin (Staatsblad van Nederlandsch Indie 1919, no. 252). Gemeenteraad mempunyai 13 anggota (7 orang Belanda, 4 orang masyarakat lokal, dan 2 orang asing dari Timur). Pada tahun 1930, anggota Gemeenteraad dipilih dengan cara yang sama hanya dilakukan penggantian orang. Dalam badan penasihat ibu kota dan dewan kota yang baru, warga negara Belanda selalu menjadi mayoritas. Dewan ini dipimpin oleh seorang Wakil Residen Banjarmasin. Peraturan ini sangat buruk dan tidak memberikan manfaat apapun karena pengurusnya dipilih oleh rakyat. Status Gemeente Banjarmasin telah ditingkatkan statusnya menjadi Stads Gemeente Banjarmasin.

Dalam surat kabar Bintang Borneo tahun 1928, Vergadering Gemeenteraad terjadi pertama kali pada tanggal 4 Juli 1919. Beberapa bulan setelah berdirinya Gemeente, masyarakat belum mengerti apa arti berdirinya Gemeente karena dalam beberapa bulan tersebut kantong rakyat negara tidak merasa terganggu, disebabkan Gemeente masih sibuk mengurus Verordeningen. Hal ini terjadi sejak pertengahan tahun 1919 hingga awal tahun 1928. Dalam pandangan Bumiputera, Gemeente tidak menepati janjinya. Di pasar Gemeente selalu terjadi perkelahian dan penghinaan antara pengelola pasar dan penjual di sana. Tingkah laku mandor seperti ini bukan merupakan hal yang baru melainkan merupakan perilaku lama dan sudah menjadi suatu kebiasaan, sering terlihat ketika hendak memberi perintah atau melarang orang, kemudian mandor ini terus-menerus mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar, serta tidak sopan. Tindakan mandor yang tidak sopan tersebut perlu ditegur oleh atasan.

Kondisi Gemeente Banjarmasin bisa dikatakan sangat buruk. Raad memutuskan untuk sekedar meminta bertemu dengan Yang Mulia, khususnya dengan maksud meminta pertolongan dan itu karena urusan uang. Dari sana, jumlah suara yang diberikan oleh non-presiden dapat ditentukan. Bertentangan dengan niat, kantor Gemeente untuk memiliki satu Statsblad untuk urusan keuangan, hal ini dihapuskan. Segala sesuatu di jalan itu sebenarnya dibangun di atas lumpur. Lapisan lumpur tampaknya memiliki kedalaman sekitar 18 hingga 50 meter, kemungkinan karena seringnya permukaan air tinggi. Artinya Gemeente harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjaga kestabilan di jalan dan hal ini tentunya tidak bisa ditanggung oleh Gemeente yang tidak memiliki likuiditas yang kuat. Berbagi ruang di jalan bukan hanya berarti tidak boleh ada sepeda, tapi juga tidak boleh ada pejalan kaki (voetganger). Tak heran jika banyak warga yang sudah merasa tidak puas dan kian setiap hari permasalahan ini menjadi lebih besar. Lalu ada soal peningkatan hubungan antara masyarakat dan

Gemeentebestur. Ada juga banyak diskusi mengenai bagaimana hal ini dapat terjadi jika situasi ini terus berlanjut dan hal jalan ini hanya dapat terjadi jika pemerintah membantu. Segalanya bisa lebih baik apabila komunikasi dengan masyarakat jika jalan umum diperbaiki dengan semestinya.

Ini sangat berat. Salah satu situasi yang paling mengkhawatirkan terjadi, ternyata kondisi jalan buruk, dll terkait dengan ini. (Dalam hal ini kami banyak ngobrol dengan Gemeente Voorzitter, bagaimana cara duduknya, satu-satunya hal yang disampaikan sejelast-jelasnya terkait dengan kerusuhan di kota Banjarmasin dan Gemeente-nya). Lalu kita lanjutkan begini: Banjarmasin harus mempunyai kesempatan mempunyai rakyatnya sendiri (tanpa utang). Tentunya hal ini tidak bisa dijelaskan, karena banyak pertanyaan mengenai hal ini yang harus dijawab terlebih dahulu dan itu saja akan memakan banyak tempo, tempo yang baik seperti ini harus kembali walauoun dihilangkan. Oleh karena itu, saya berharap agar Gemeenteraad Banjarmasin sukses sehingga Gemeente dapat memperoleh manfaat dari bantuan sebesar F400,000.

### **Gemeente Banjarmasin Mengelola Air Untuk Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Masyarakat**

Dalam surat kabar Bintang Borneo tahun 1928, Banjarmasin mempunyai 47.000 jiwa, terdiri dari 43.000 penduduk Melayu, 3.000 penduduk Tionghoa, dan 1.000 penduduk Eropa. Banyak penduduk yang tidak memiliki tangki air (tempat menyimpan air), mereka menyewa dan jika musim panas tiba, mereka tidak dapat memperoleh air minum yang baik (air tawar atau air hujan), maka mereka dapat menggunakan air simpanan tersebut. Namun terkadang jumlah air tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan semua ini tentu menimbulkan banyak perdebatan di benak mereka tentang bagaimana cara mendapatkan air untuk kebutuhan mereka. Itu semua kalau airnya tawar, ada keadaan yang harus diperhatikan tapi air di kota tidak selalu segar. Oleh karena itu, Gemeente selalu turun tangan untuk memudahkan kehidupan penduduk termasuk mengambil air dari atas (20 kilometer letak dari kota) dan air sungai yang tentunya tidak baik untuk digunakan masyarakat. Seperti yang dikatakan, banyak masyarakat membeli dari perahu punya Gemeente seharga 3 sen dan menjualnya di desa seharga 12 sampai 20 sen, dengan harga segitu tetap laku. Dengan melihat tempat ini, masyarakat pasti berpikir bahwa Gemeente ada untuk mengatasi masalah kesulitan masyarakat kota. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, kesehatan masyarakat di Banjarmasin tidak bisa terjaga dengan baik.

Lambat laun disadari bahwa hal itu mungkin terjadi dan kini kenyataan bisa dikumpulkan di kawasan Ulin, sekitar 23 kilometer dari kota. Masih banyak yang dituturkan

mengenai keunggulan dengan sejelas-sejelasnya dan secepat mungkin. Pada akhirnya, sesuatu terungkap ketika Direktur Utama Leevert tiba di Banjarmasin dan Gemeente sangat senang menerima tunjangan yang melimpah dari Tuan Leevert. Atas nama Gemeenteraad, saya memohon kepada Yang Mulia untuk berkenan menerima permintaan ini dan seandainya diterima, segera menerimanya. Untuk kebutuhan tersebut, Z.E senang membantu. Hal lain yang terkait dengan hal tersebut adalah tuntutan dan tentunya ada permasalahan terkait uang negara yang saat ini juga dianggap sulit. Ada penasihat desentralisasi, Mr. Cohen Stuart dan terdapat pertanyaan yaitu Banjarmasin dapat berapa segera dan ada alokasi untuk itu, sedangkan sisanya (sesuai kebutuhan 4 ton) akan diberikan nanti dan akan disambungkan kepada direktur Ruckert (komite yang bertugas memastikan bahwa uang tersebut dari pemerintah) dan karena itu, akan memiliki kekuasaan lebih besar yang memungkinkan dia melakukan apa yang dianggap perlu atau tidak. Dengan ini, kami dapat mengatakan bahwa permintaan tersebut datang dari Z.E. Ada rasa kesepakatan dan lain-lain mengenai hibah yang akan dibayarkan di sini (di mana melihat situasi di Banjarmasin), tuan-tuan H.H.M. Cohen Stuart dan Ir. Sukert pada bulan Maret.

Sejak Gemeente Banjarmasin didirikan pada tahun 1919-1928, sekitar 9 tahun tidak berjalan dengan baik dan baru pada tahun ini, Regeering mulai bermurah hati memberikan hibah sejumlah 400.000 Rupiah untuk perbaikan kota Banjarmasin, khususnya perbaikan jalan, jembatan, dan parit-parit. Masyarakat harus berterima kasih kepada para pemimpin Voeezliter dan Gemeente yang bekerja keras mementingkan dana ini dengan sangat serius. Kami sangat yakin bahwa teori Gemeente tentang penggunaan uang sangat bagus; semua demi kebahagiaan dan kesehatan masyarakat kota Banjarmasin dan teori tersebut telah sesuai dengan praktik. Masyarakat berharap dengan adanya pendanaan ini, kegiatan Gemeente Werken dapat direvisi total agar sesuai dengan kebutuhan khusus kota Banjarmasin.

Pada tahun 1943, diresmikan saluran Air minum di Banjarmasin, yang tidak dilaksanakan pada pemerintahan Belanda dan disebut Coerdo. Demikian pula dengan rumah sakit umum di Fort Tatas dipindahkan ke km 1 Jalan Ulin pada tahun 1944. Pada tanggal 9 November 1945, terjadi pertempuran pertama di Banjarmasin. Kota Banjarmasin mengalami kerusakan akibat aksi sabotase, seperti pembakaran pelabuhan Martapura dan stasiun kereta api Ulin. Kemudian pada tahun 1946-1949, Belanda membangun kembali pelabuhan lama Benteng Tatas dan Anvil Ulin.

## **KESIMPULAN**

Gemeente memiliki lembaga bernama Gementeerad, yang merupakan badan legislatif dan terkadang juga memiliki fungsi eksekutif yang dipimpin oleh seorang walikota. Dalam surat

kabar Bintang Borneo tahun 1928, pada bagian ini Vergadering akan meliputi isu-isu lain mengenai masalah sosial. Pemerintah kolonial Belanda menguasai Kalimantan secara penuh pada tahun 1860, dan kemudian dimulailah pembagian administratif wilayah tersebut di bawah Arah Kolonel ECP Happel sebagai residen (Bondan, 1953; Saleh : 1977:65). Gemeente selalu turun tangan untuk memudahkan kehidupan masyarakat terutama dengan mengambil air dari atas (20 km dari kota) dan air sungai yang tentunya tidak baik untuk digunakan masyarakat. Sejak berdirinya Gemeente Banjarmasin pada tahun 1919-1928, sekitar 9 tahun tidak berjalan dengan baik dan baru pada tahun ini, Regeering mulai bermurah hati memberikan hibah sebesar 400.000 Rupiah untuk perbaikan kota Banjarmasin, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan parit-parit.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Azmi, M.Pd. dan Bapak Rizal Izmi Kusumawijaya, M.Pd. yang sudah membimbing penulis dalam menulis artikel hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan artikel ini.

### **REFERENSI**

- Anwari, I. R. M. (2016). Kebijakan Perekonomian Gemeente Surabaya tahun 1906-1942. 1942(October), 1–78.
- Hestiliani, T. (2019). Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 15(2), 430–439.
- Kurni, R. R. M. A., Azmi, M., & Marfuah, S. (2022). RESPON MASYARAKAT DAYAK TERHADAP ORGANISASI KRISTEN DI BORNEO PADA TAHUN 1928-1930. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.30872/amt.v2i2.2767>
- Kusliansjah, K., Siahaan, U., & Tobing, R. R. (2016). Reinterpretation of Architectural Identity in a Tidal Waterfront City (Case Study: Transformation of the Riverbank Area in Banjarmasin's Old City Center). *International Journal of Architecture and Urban Development*, 6(1), 33–41.
- Mentayani, I., Noor Muchamad, B., & Heldiansyah, J. C. PESANGGRAHAN MANDIANGIN: Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiangin.
- Nawawi, R., Ruslan, T., & Aziddin, Y. (1986). Sejarah kota banjarmasin. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Saleb, B & Hassan, A. (1928). Gemeente Banjarmasin: Sosial contact antara Gemeente dengan penduduk Bumiputera terhadap kepada teori dan praktiknya. Banjarmasin: W. SMITS.
- Saleb, B & Hassan, A. (1928). Gemeente dengan Subsidiya. Banjarmasin: W. SMITS.
- Saleb, B & Hassan, A. (1928). Mandor Gemeente yang kasar. Banjarmasin: W. SMITS.

- Saleb, B & Hassan, A. (1928). Pemilihan leden Gemeente dan contact Gemeente dengan penduduk. Banjarmasin: W. SMITS.
- Setiadi, A. (2018). Pengaruh Politik Dan Ekonomi Terhadap Transformasi Urbanitas Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin.
- Soei, T, L. (1928). Gemeente Banjarmasin. Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin (Sambungan). Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin (Sambungan). Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin (Sambungan). Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin (Sambungan, Pembetulan Jalanan-Jalanan). Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin (Sambungan, Tentang pembicaraan waterleiding buat kota Banjarmasin). Banjarmasin: W. SMITS.
- Soei, T, L. (1928). Sosial Gemeente Banjarmasin. Banjarmasin: W. SMITS.
- Subroto, W. (2014). Sejarah Kota Banjarmasin Ketika Terjadi Perubahan Orientasi Dari Air ke Darat Pada Awal Abad XX. SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 1(1), 87-91.
- Subroto, W. (2018). Power Shift and Socio-Political Changes on Banjarmasin In 19 th -20 th Century. Sejarah Dan Budaya, 2, 120-127.
- Susilowati, E. (2020). The influence of waters environment on the existence of Martapura port in Banjarmasin, South Kalimantan. E3S Web of Conferences, 202, 1-15.